

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Juni  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

| No       | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Testimoni Penerima | Bukti Testimoni | Lokasi   | Sub Unit Organisasi SKPD                        | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|----------|-------------------|--|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------------|-----------------|----------|---|---|--|
|          |                   |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)    | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                    |                 |          |   |   |  |
| 1        | 05.02.01          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 86.822.826.814 | 42,21  | 42,21     | 0       | 32.493.444.673 | 37,43      | 26.640.860.461 | 30,68         | 6,75    |                    |                 |          |   |   |  |
| 01.01    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.997.600      | 82,8   | 82,8      | 0       | 7.947.700      | 79,5       | 7.795.022      | 77,97         | 1,53    |                    |                 |          |   |   |  |
| 01.01.01 | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3.998.000      | 100    | 100       | 0       | 3.998.000      | 100        | 3.998.000      | 100           | 0       |                    |                 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Dokumen RENSTRA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen RENJA Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Dokumen RENJA Perangkat Daerah Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Dokumen Perjanjian Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Berita Acara Forum OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Dokumen ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah</p> <p>2. Tersusunya Berita Acara Forum Perangkat Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Sudah sesuai target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |

|          |                   |                                       |           |    |    |   |           |      |           |       |      |          |  |   |   |
|----------|-------------------|---------------------------------------|-----------|----|----|---|-----------|------|-----------|-------|------|----------|--|---|---|
| 01.01.02 | 5.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD | 3.999.900 | 72 | 72 | 0 | 2.700.000 | 67,5 | 2.637.322 | 65,93 | 1,57 | BPKA DIY | BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET - Sekretariat | <p>1. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen DPA SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen DPA SKPD Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya dokumen DPA BPKA tahun 2024</p> <p>2. Tersedianya dokumen RKA BPKA tahun 2024</p> <p>3. Proses usulan revisi DPA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 362.478,- terdiri dari : 1. Belanja ATK sebesar Rp. 5.000,- dan Belanja bahan komputer sebesar Rp. 57.478,- karena terdapat selisih harga dengan marketplace</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
|----------|-------------------|---------------------------------------|-----------|----|----|---|-----------|------|-----------|-------|------|----------|--|---|---|

|          |                   |  |                |       |       |   |                |       |                |       |      |          |   |  |
|----------|-------------------|--|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|----------------|-------|------|----------|---|--|
| 01.01.03 | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 1.999.700      | 70    | 70    | 0 | 1.249.700      | 62,49 | 1.159.700      | 57,99 | 4,5  | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya laporan Monev Bulan Mei</p> <p>2. Terlaksananya input revisi data ROPK Perangkat daerah Tahun 2024</p> <p>3. Tersusunnya dokumen LKJiP 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sudah sesuai target , terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- berupa Belanja cetak dan penggandaan, dikarenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
| 01.02    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 84.192.265.894 | 41,98 | 41,98 | 0 | 31.244.828.253 | 37,11 | 25.507.536.620 | 30,3  | 6,81 |          |   | <p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang dari 240 Orang</p> <p>2. Gaji dan Tunjangan ASN : 240 Orang dari 240 Orang</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY bulan Juni</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY Bulan Juni</p> <p>3. Tersusunnya SPM kekurangan gaji</p>   |

|          |                   |                                   |                |       |       |   |                |       |                |       |      |          |   |  |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|----------------|-------|------|----------|---|--|
| 01.02.01 | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 84.182.746.394 | 41,98 | 41,98 | 0 | 31.236.691.403 | 37,11 | 25.499.938.270 | 30,29 | 6,82 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <b>Faktor Penghambat:</b><br>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Juni , Terapat Deviasi keuangan sebesar Rp. 5.736.753.132,- terdiri dari :<br>1. Belanja Gai Pokok PNS Rp. 2.515.522.800,-<br>2. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 450.558.408,-<br>3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 204.277.598,-<br>4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp. 135.200.000,-<br>5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp. 73.480.000,-<br>6. Belanja Tunangan Fungsional Umum PNS Rp. 83.253.575,-<br>7. Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 102.360.500,-<br>8. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS Rp. 11.575.468,-<br>9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 37.975,-<br>10. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 132.182.995,-<br>11. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp. 17.395.840,-<br>12. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 3.520.711,-<br>13. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp. 511.118,-<br>14. Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp. 10.562.121,- |
|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|----------------|-------|------|----------|---|--|



|          |                   |  |           |     |     |   |           |       |           |       |      |          |   |  |  |
|----------|-------------------|--|-----------|-----|-----|---|-----------|-------|-----------|-------|------|----------|---|--|--|
| 01.02.03 | 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              | 4.999.800 | 100 | 100 | 0 | 4.999.800 | 100   | 4.617.700 | 92,36 | 7,64 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Laporan Keuangan Un Audited dan Audited : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>   | <p>3. SDM yang kompeten</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Dokumen laporan keuangan Un Audited</p> <p>2. Tersusunnya dokumen laporan keuangan Audited</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Realisasi fisik sesuai target selesai 100% terdapat efisiensi sebesar Rp. 382.100,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
| 01.02.04 | 5.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 2.999.700 | 80  | 80  | 0 | 2.377.050 | 79,24 | 2.220.650 | 74,03 | 5,21 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 0 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Dokumen Prognosis : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya laporan keuangan sampai denagn bulan Juni</p> <p>2.. Tersusunnya laporan penerimaan bulan Juni</p> <p>3. Tersusunnya laporan pengeluaran bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>   |

|          |                   |  |           |      |      |   |           |       |           |       |      |          |   |   |   |  |   |
|----------|-------------------|--|-----------|------|------|---|-----------|-------|-----------|-------|------|----------|---|---|---|--|---|
|          |                   | SKPD   |           |      |      |   |           |       |           |       |      |          |   |   |   |  | Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 156.400,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |
| 01.03    | 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.400.000 | 50   | 50   | 0 | 700.000   | 50    | 700.000   | 50    | 0    |          |   |   |   |  |   |
| 01.03.01 | 5.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD            | 1.400.000 | 50   | 50   | 0 | 700.000   | 50    | 700.000   | 50    | 0    | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Dokumen Laporan BMD : 6 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedia data penerimaan barang sampai dengan bulan Juni<br>2. Tersusunnya laporan persediaan barang bulan Juni<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>REalisasi sesuai target<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |  |   |
| 01.04    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 8.215.000 | 62,5 | 62,5 | 0 | 4.565.000 | 55,57 | 4.175.500 | 50,83 | 4,74 |          |   |   |   |  |   |

|          |                   |   |             |       |       |   |             |       |             |       |      |          |                              |   |
|----------|-------------------|---|-------------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------|-------|------|----------|------------------------------|---|
| 01.04.01 | 5.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 8.215.000   | 62,5  | 62,5  | 0 | 4.565.000   | 55,57 | 4.175.500   | 50,83 | 4,74 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai : 6 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi kepegawaian antar bidang</li> <li>2. Terkoreksinya presensi pegawai bulan Juni</li> <li>3. terselesaikannya peremajaan data pegawai</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- terdiri dari : sisa angkas pada 1. Belanja Alat Tulis kantor (efisiensi) sebesar Rp. 28.000,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 192.000,- 3. Belanja cetak sebesar Rp. 140.000,- dan Belanja makan minum rapat Rp. 30.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol> |
| 01.05    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 681.542.500 | 54,38 | 54,38 | 0 | 352.169.700 | 51,67 | 319.726.718 | 46,91 | 4,76 |          |                              |   |
|          |                   |   |             |       |       |   |             |       |             |       |      |          |                              | <p>1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>   |

|          |                   |  |           |    |    |   |           |       |           |       |     |          |                              |   |
|----------|-------------------|--|-----------|----|----|---|-----------|-------|-----------|-------|-----|----------|------------------------------|---|
| 01.05.01 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.279.000 | 54 | 54 | 0 | 4.938.000 | 53,22 | 4.586.000 | 49,42 | 3,8 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>2. Paket Komponen Instalasi Listrik : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>1. Tersedianya alat listrik berupa Batu baterai dan stop kontak</p> <p>2. Tersedianya bahan penerangan bangun kantor berupa lampu LED</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 352.000,- berupa sisa angkas sampai dengan bulan mei di karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3.SDM yang kompeten</p> |
|          |                   |  |           |    |    |   |           |       |           |       |     |          |                              | <p>1. Jumlah Paket Peralatandan Perengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 5 Paket</p> <p>2. Paket Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Paket Alat Tulis kantor : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Paket Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Paket Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedia nya Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Tersedia nya kertas dan cover</p> <p>3. Tersedia nya bahan komputer</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>  |

|          |                   |  |             |      |      |   |            |       |            |       |      |          |                              |  |   |
|----------|-------------------|--|-------------|------|------|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|------------------------------|--|---|
| 01.05.02 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 134.153.900 | 48,9 | 48,9 | 0 | 60.831.400 | 45,34 | 57.685.250 | 43    | 2,34 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 6. Paket Bahan Kegiatan Kantor Lainnya : 0 Paket dari 1 Paket  | Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.145.550,- terdiri dari : belum di belanjakan : 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.044.440,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 620.510,- 3. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 1.412.600,- dan 4. Belanja bahan lainnya Rp. 108.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |
| 01.05.03 | 5.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | 17.926.500  | 54   | 54   | 0 | 9.293.700  | 51,84 | 8.566.700  | 47,79 | 4,05 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket<br>2. Paket Peralatan Rumah Tangga : 1 Paket dari 1 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedia nya perabot kantor berupa bahan kebersihan ruangan<br>2. Tersedia nya bahan kebersihan kendaraan<br>3. Tersedia nya bahan kebersihan lantai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 736.000,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Juni<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024  |



|          |                   |  |            |      |      |   |           |    |           |       |       |          |                              |  |  |
|----------|-------------------|--|------------|------|------|---|-----------|----|-----------|-------|-------|----------|------------------------------|--|--|
| 01.05.05 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 11.232.000 | 53,5 | 53,5 | 0 | 5.616.000 | 50 | 4.350.000 | 38,73 | 11,27 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>2. Bahan bacaan berupa Koran : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Bahan bacaan berupa Majalah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Bahan bacaan berupa Surat Kabar : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p>1. Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar bulan Juni</p> <p>2. Tersedianya bahan bacaan berupa majalah bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.266.000,- Belanja bersifat persediaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
|          |                   |  |            |      |      |   |           |    |           |       |       |          |                              | <p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>2. Laporan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan</p>         | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya jamuan makan minum koordinasi internal</p> <p>2. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan kerja Pansus II LKPJ bidang Ekonomi DPRD Propinsi Kalimantan SELatan tanggal 26 April</p> <p>3. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Mei 2024</p>  |

|          |                   |  |             |    |    |   |             |       |             |       |      |          |                              |  |
|----------|-------------------|--|-------------|----|----|---|-------------|-------|-------------|-------|------|----------|------------------------------|--|
| 01.05.06 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 370.164.000 | 56 | 56 | 0 | 203.295.000 | 54,92 | 182.966.318 | 49,43 | 5,49 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>4. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari DPRD Propinsi Bali tanggal 23 April 2024</p> <p>5. Tersedia nya jamuan makan minum kunjungan tamu dari BPKD Propinsi Bangka belitung tanggal 17 April 2024</p> <p>6. Terlaksananya Sosialisasi whistie system dan pengendalian gratifikasi tanggal 30 dan 31 Mei 2024</p> <p>4. Terlaksananya konsultasi luar daerah ke Jakarta dalam mengirimn SPP Dais tahap II TA 20240 tanggal 08 Mei 2024</p> <p>5. Terlaksananya konsultasi luar daerah ke jakarta dalam rangka Menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 22 - 23 april 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 20.328.692,- terdiri dari : Belum di belanjakan :</p> <p>1. Belanja kertas dan cover Rp. 138.000,- 2. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 15.255.000,- 3. Belanja honorarium Rp. 2.000.000,- dan Belanja Perjalanan dinas sebesar Rp. 2.927.282,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> |
|----------|-------------------|--|-------------|----|----|---|-------------|-------|-------------|-------|------|----------|------------------------------|--|



|          |                   |  |               |       |       |   |             |      |             |       |      |          |                              |  |   |  |  |
|----------|-------------------|--|---------------|-------|-------|---|-------------|------|-------------|-------|------|----------|------------------------------|--|---|--|--|
| 01.06    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30.632.000    | 100   | 100   | 0 | 30.632.000  | 100  | 30.049.998  | 98,1  | 1,9  |          |                              |  |   |  |  |
| 01.06.01 | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 30.632.000    | 100   | 100   | 0 | 30.632.000  | 100  | 30.049.998  | 98,1  | 1,9  | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya : Unit dari 9 Unit<br>2. Komputer : 2 Unit dari 2 Unit<br>3. Keyboard dan Mouse : 4 Unit dari 4 Unit<br>4. Monitor : 3 Unit dari 3 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedia nya CPU<br>2. Tersedia nya Monitor komputer LED<br>3. Tersedia nya Keyboard<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terdapat efisiensi sebesar Rp. 582.002<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |  |  |
| 01.07    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1.551.535.100 | 45,24 | 45,24 | 0 | 687.377.800 | 44,3 | 612.624.843 | 39,49 | 4,81 |          |                              |  |   |  |  |
| 01.07.01 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 18.450.000    | 57    | 57    | 0 | 5.000.000   | 27,1 | 3.800.000   | 20,6  | 6,5  | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>2. Penyediaan Materai : 350 Buah dari 1685 Buah<br>3. Pengiriman dokumen : 4 Kg dari 16 Kg          | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedia nya jasa surat berupa benda pos (materai)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Anggaran merupakan persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- terdiri dari : 1. Belanja benda pos (materai) sebesar Rp. 1.100.000,- dan Belanja jasa pengiriman sebesar Rp. 100.000,-  |  |  |





|          |                   |   |             |       |       |   |             |       |             |       |      |  |  |  |  |   |   |
|----------|-------------------|---|-------------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------|-------|------|--|--|--|--|---|---|
| 01.07.04 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 534.372.000 | 36,35 | 36,35 | 0 | 193.274.000 | 36,17 | 191.781.000 | 35,89 | 0,28 |  |  |  |  | <p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>2. Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan : 6 Laporan dari 12 Laporan</p>          | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor sampai dengan bulan Mei</p> <p>2. Terpenuhinya jasa pengamanan gudang kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.493.000,- terdiri dari : sisa angkas 1. Belanja jasa kebersihan Rp. 729.699,- dan 2. Belanja jasa tenaga keamanan Rp. 881.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
| 01.08    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 347.238.720 | 51,54 | 51,54 | 0 | 165.224.220 | 47,58 | 158.251.760 | 45,57 | 2,01 |  |  |  |  |   |   |
|          |                   |   |             |       |       |   |             |       |             |       |      |  |  |  |  | <p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan : 1 Unit dari 1 Unit</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas jabatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>   |

|          |                   |  |            |      |      |   |           |      |           |      |      |          |                              |  |   |
|----------|-------------------|--|------------|------|------|---|-----------|------|-----------|------|------|----------|------------------------------|--|---|
| 01.08.01 | 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.811.000 | 12,5 | 12,5 | 0 | 1.080.000 | 9,99 | 1.050.000 | 9,71 | 0,28 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | Sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 30.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |   |
|          |                   |  |            |      |      |   |           |      |           |      |      |          |                              | 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 0 Unit dari 17 Unit<br>2. Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 : 10 Unit dari 10 Unit<br>3. Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan dinas operasional bulan Juni<br>2. Terbayarkannya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 AB 1500 IF<br>3. Terbayarkannya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 AB 2864 IS dan AB 2651 IH<br><b>Faktor Penghambat:</b> |

|          |                   |   |             |    |    |   |            |       |            |       |      |          |                              |  |
|----------|-------------------|---|-------------|----|----|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|------------------------------|--|
| 01.08.02 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 221.187.720 | 42 | 42 | 0 | 81.954.220 | 37,05 | 77.449.510 | 35,02 | 2,03 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.504.710,- terdiri dari : 1. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Rp. 1.098.590,- 2. Belanja penggantian suku cadang Rp. 405.000,- 3. Belanja pajak kendaraan Rp. 1.638.200,- 4. Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp. 50.000,- dan Belanja pemeliharaan dinas roda 2 Rp. 1.312.500,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol> |
|          |                   |   |             |    |    |   |            |       |            |       |      |          |                              | <p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 77 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Sepeda Roda Dua : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>3. Pemeliharaan Projector : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>4. Pemeliharaan CCTV : 8 Unit dari 8 Unit</p> <p>5. Pemeliharaan Meubelair : 11 Unit dari 11 Unit</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terpeliharanya LCD Proyektor</li> <li>2. Terlaksananya pemeliharaan Printer 4 unit</li> <li>3. Terlaksananya pemeliharaan Komputer 4 unit</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>  |

|          |                   |  |            |      |      |   |            |       |            |       |      |          |                              |   |   |
|----------|-------------------|--|------------|------|------|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|------------------------------|---|---|
| 01.08.03 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 55.240.000 | 59,2 | 59,2 | 0 | 32.190.000 | 58,27 | 30.290.000 | 54,83 | 3,44 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>6. Pemeliharaan AC Central : 2 Unit dari 5 Unit</p> <p>7. Pemeliharaan AC Split : 9 Unit dari 15 Unit</p> <p>8. Pemeliharaan Notebook/Laptop : 9 Unit dari 23 Unit</p> <p>9. Pemeliharaan Printer : 4 Unit dari 10 Unit</p>  | <p>Dikarenakan anggaran merupakan persediaan , sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp. 1.900.000,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja pemeliharaan mesin ketik Rp. 400.000, 2. Belanja Pemeliharaan CCTV Rp. 1.100.000,- dan Belanja Pemeliharaan AC Rp. 380.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
| 01.08.04 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60.000.000 | 86,7 | 86,7 | 0 | 50.000.000 | 83,33 | 49.462.250 | 82,44 | 0,89 | BPKA DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | <p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Paket dari 4 Paket</p> <p>2. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Depo Arsip : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pemeliharaan Gudang : 1 Paket dari 2 Paket</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya pemeliharaan bangunan gudang badran</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 37.750,- adalah efisiensi pada pemeliharaan gedung kantor dan terdapat sisa angkas pemeliharaan gudang sebesar Rp. 500.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>  |



|          |                   |  |            |    |    |   |            |       |            |       |       |          |   |  |  |
|----------|-------------------|--|------------|----|----|---|------------|-------|------------|-------|-------|----------|---|--|--|
| 02.01.02 | 5.02.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 39.172.800 | 54 | 54 | 0 | 19.500.000 | 49,78 | 14.930.505 | 38,11 | 11,67 | BPKA DIY | Bidang Anggaran Belanja - Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan | <p>1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen KUA Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen PPAS Perubahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>rapat koordinasi internal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.794.495,- terdiri dari :<br/> 1. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 3.819.495,- (merupakan sisa pengadaan, sifatnya eksternal)<br/> 2. Belanja makan dan minum rapat Rp. 975.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br/> 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br/> 3. SDM yang kompeten</p> |
|          |                   |  |            |    |    |   |            |       |            |       |       |          |   | <p>1. Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi : 0 Dokumen dari 32 Dokumen</p> <p>2. Dokumen DPA - SKPD : 32 Dokumen dari 32 Dokumen</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Mengadakan Rapat untuk membahas usulan pergeseran anggaran tahun 2024 antara TAPD bersama dengan OPD yang mengusulkan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>   |

|          |                   |  |            |    |    |   |            |       |            |       |      |          |  |   |
|----------|-------------------|--|------------|----|----|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|--|---|
| 02.01.03 | 5.02.02.1.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                              | 12.366.000 | 77 | 77 | 0 | 9.139.000  | 73,9  | 8.088.000  | 65,41 | 8,49 | BPKA DIY | Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Perekonomian | Setelah didapatkan kesepakatan dalam forum rapat, pergeseran sedang dalam proses sampai akhir bulan Juni masih di tahap penganggaran. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.051.000,- terdiri dari : Belanja pembelian bahan komputer sebesar Rp. 1.018.000,- dan belanja alat tulis kantor Rp. 33.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b> Didapatkannya pemahaman bersama antara TAPD dan OPD bahwa pergeseran sedang berproses.   |
| 02.01.04 | 5.02.02.1.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala | 82.683.750 | 35 | 35 | 0 | 21.783.750 | 26,35 | 17.578.707 | 21,26 | 5,09 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN                                       | 1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen<br>2. Perda APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen<br>3. Perkada Penjabaran APBD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Tersusunnya dokumen Perda APBD tahun anggaran 2024<br>2. Tersusunnya dokumen Pergub APBD tahun anggaran 2024<br>3. Tersusunnya Pergeseran Anggaran tahap 1 pada Bulan April 2024<br>4. Rencana Pergeseran Anggaran tahap 2 masih menunggu Berita Acara Pembahasan Dais<br><br><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.555.707,- terdiri dari : |



|          |                   |   |             |    |    |   |            |      |           |      |       |          |   |   |   |
|----------|-------------------|---|-------------|----|----|---|------------|------|-----------|------|-------|----------|---|---|---|
| 02.01.05 | 5.02.02.1.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 101.475.000 | 29 | 29 | 0 | 20.807.000 | 20,5 | 7.092.667 | 6,99 | 13,51 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Anggaran Belanja | <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 13.714.333,- dengan rincian (merupakan faktor eksternal, pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.492.742,-</li> <li>2. Belanja bahan cetak Rp. 8.466.600,- dikarenakan sesuai kebutuhan (merupakan faktor eksternal, pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais)</li> <li>3. Belanja alat listrik sebesar Rp. 280.000,-</li> <li>4. Belanja makan dan minum rapat Rp. 1.425.000,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</li> <li>3. SDM yang kompeten</li> </ol> |   |
|          |                   |   |             |    |    |   |            |      |           |      |       |          |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran : Dokumen dari 30 Dokumen</li> <li>2. Keputusan Gubernur Penetapan Bendahara dan KPA BOS : Dokumen dari 2 Dokumen</li> </ol>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>masih dalam proses penyelesaian. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri</p> |

|          |                   |  |            |       |       |   |           |       |           |       |      |          |   |  |  |
|----------|-------------------|--|------------|-------|-------|---|-----------|-------|-----------|-------|------|----------|---|--|--|
| 02.01.06 | 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   | 77.500.000 | 0,88  | 0,88  | 0 | 675.000   | 0,87  | 675.000   | 0,87  | 0    | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah                           | 3. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : Dokumen dari 1 Dokumen<br>4. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos : Dokumen dari 6 Dokumen<br>5. Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA dana Dekonsentrasi : Dokumen dari 19 Dokumen<br>6. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB : Dokumen dari 2 Dokumen  | <b>Faktor Penghambat:</b><br><br>Sesuai target<br><br><b>Faktor Pendukung:</b><br><br>Koordinasi yang baik antara OPD yang satu dengan yang lainnya beserta dengan bidang-bidang di BPKA DIY |
| 02.02    | 5.02.02.1.02      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota   | 18.074.000 | 26,54 | 26,54 | 0 | 4.748.000 | 26,27 | 3.776.000 | 20,89 | 5,38 |          |   |  |  |
| 02.02.01 | 5.02.02.1.02.0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | 5.000.000  | 0     | 0     | 0 | 0         | 0     | 0         | 0     | 0    | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota | 1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan<br>2. Evaluasi RAPBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>3. Evaluasi RAPBD Kabupaten Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>4. Evaluasi RAPBD Kabupaten Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>5. Evaluasi RAPBD Kabupaten Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>6. Evaluasi RAPBD Kabupaten Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |

|          |                   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |  |   |
|----------|-------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|--|---|
| 02.02.02 | 5.02.02.1.02.0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota | <p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Evaluasi RPAPBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Evaluasi RPAPBD Kabupaten Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>  |
|          |                   | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | <p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Bantul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Menerbitkan dan menyampaikan surat Kepala BPKA Nomor 100.3.2/2137 tanggal 8 Maret 2024 kepada OPD-OPD perihal Permohonan Personil Tim Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>Saat ini sedang dalam proses evaluasi Gubernur.</p> |

|          |                   |   |           |       |       |   |           |       |           |       |       |          |   |  |   |
|----------|-------------------|---|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|-----------|-------|-------|----------|---|--|---|
| 02.02.03 | 5.02.02.1.02.0004 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 61,15 | 61,15 | 0 | 3.056.000 | 61,12 | 2.084.000 | 41,68 | 19,44 | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota | <p>4. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Sleman : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>             | <p>- Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 972.000,- pada belanja makan dan minum rapat dalam proses SPJ</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.</p> |
|          |                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan   |           |       |       |   |           |       |           |       |       |          | Bidang Akuntansi  | <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terselesaikannya dokumen laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2023</p>   |

|          |                   |  |            |       |       |   |            |       |            |       |      |          |  |   |  |
|----------|-------------------|--|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|--|---|--|
| 02.02.04 | 5.02.02.1.02.0012 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah   | 3.074.000  | 56,6  | 56,6  | 0 | 1.692.000  | 55,04 | 1.692.000  | 55,04 | 0    | BPKA DIY | Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan | 3. Laporan Tugas Pembantuan TA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai target<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi bisa dilakukan secara online<br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |
| 02.03    | 5.02.02.1.03      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   | 98.694.000 | 53,62 | 53,62 | 0 | 29.729.000 | 30,12 | 26.801.500 | 27,16 | 2,96 |          |  |   |  |
| 02.03.01 | 5.02.02.1.03.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 69.410.000 | 46,5  | 46,5  | 0 | 9.505.000  | 13,69 | 9.505.000  | 13,69 | 0    | BPKA DIY | Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan   | 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 Laporan dari 2 Laporan<br>2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas : 0 Laporan dari 1 Laporan<br>3. Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 Laporan dari 1 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terbitnya berita acara rekonsiliasi pajak pusat untuk pelaporan data pajak semester 2 tahun 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Sesuai target<br><b>Faktor Pendukung:</b>   |



|          |                   |  |             |       |       |   |            |       |            |       |       |          |  |   |  |  |  |  |
|----------|-------------------|--|-------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|-------|----------|--|---|--|--|--|--|
| 02.04    | 5.02.02.1.04      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                   | 174.988.900 | 54,95 | 54,95 | 0 | 85.121.900 | 48,64 | 55.072.400 | 31,47 | 17,17 |          |  |   |  |  |  |  |
| 02.04.01 | 5.02.02.1.04.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 8.723.700   | 28,87 | 28,87 | 0 | 2.423.700  | 27,78 | 1.223.700  | 14,03 | 13,75 | BPKA DIY | Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan | 1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran : 0 Laporan dari 12 Laporan<br>2. Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran : 6 Laporan dari 12 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br>Tersedianya bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br><br>Terlaksananya koordinasi dan penjelasan SE Penyusunan LK Semesteran dan Prognosis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- beupa belanja makan dan minum rapat<br>- Aplikasi SIPD belum bisa mencetak per KPA<br>- Data persediaan dan aset belum valid<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |  |  |  |
|          |                   |  |             |       |       |   |            |       |            |       |       |          |  | 1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi : 0 Laporan dari 2 Laporan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>   |  |  |  |

|          |                   |  |            |     |     |   |            |       |            |       |      |          |  |  |   |
|----------|-------------------|--|------------|-----|-----|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|--|--|---|
| 02.04.02 | 5.02.02.1.04.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 20.926.500 | 100 | 100 | 0 | 17.551.500 | 83,87 | 17.188.000 | 82,14 | 1,73 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Akuntansi | <p>2. Laporan Keuangan UnAudited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>  | <p>1. Terelesaikannya cetak laporan keuangan un audited Tahun anggaran 2023</p> <p>2. Terlaksananya Rekonsiliasi Informasi Keuangan Daerah</p> <p>3. Terelesaikannya cetak laporan keuangan Audited TA 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 363.500,- merupakan sisa belanja / efisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>SIPD sudah bisa digunakan untuk proses penyusunan laporan keuangan</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
|          |                   |  |            |     |     |   |            |       |            |       |      |          |  | <p>1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terelesaikannya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>  |

|          |                   |   |            |       |       |   |            |       |            |       |       |          |   |   |  |
|----------|-------------------|---|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|-------|----------|---|---|--|
| 02.04.03 | 5.02.02.1.04.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 54.202.800 | 72,46 | 72,46 | 0 | 34.702.800 | 64,02 | 27.537.800 | 50,81 | 13,21 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Akuntansi                  | 3. Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  | 2. Terselesaikannya dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi<br>03.00<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.7.165.000,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 31.000,- 2. Belanja kertas dan coverRp. 64.000,- 3. Belanja bahan cetak Rp. 7.070.000,- di karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan<br>- Aplikasi SIPD belum bisa mencetak lampiran raperda secara sempurna<br>- Aplikasi SIPD belum bisa mencetak laporan per KPA<br>- Data persediaan dan aset belum valid<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Data SIPD bisa diolah secara manual |
| 02.04.04 | 5.02.02.1.04.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | 3.694.900  | 100   | 100   | 0 | 3.694.900  | 100   | 3.469.900  | 93,91 | 6,09  | BPKA DIY | Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perencanaan | 1. Jumlah Dokumen Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. LHP BPK atas Laporan Keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br>Terselesaikannya dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Selesai sesuai target, terdapat efisiensi sebesar Rp. 225.000,-<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |



|          |                   |   |            |     |     |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |  |
|----------|-------------------|---|------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|--|
| 02.04.06 | 5.02.02.1.04.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 53.306.000 | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPKA DIY | Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan | <p>1. Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>                   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Koordinasi internal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |
| 02.04.07 | 5.02.02.1.04.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi         | 7.386.000  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPKA DIY | Bidang Akuntansi Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian | <p>1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi : 0 Orang dari 80 Orang</p> <p>2. Sumber Daya Manusia yang handal dan Kompeten : 0 Orang dari 80 Orang</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>   |
|          |                   |   |            |     |     |   |   |   |   |   |   |   |          |  | <p>1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina : 0 Lembaga dari 8 Lembaga</p> <p>2. RS Jiwa Grhasia : 1 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. RS Respira : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p>   | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada bulan Maret 2024 kemarin dilaksanakan Sosialisasi E-BLUD dari Kemendagri yang diselenggarakan di Yogyakarta.</p> <p>Mengundang pembina BLUD dari Pemda DIY dan perwakilan dari BLUD di DIY.</p>  |

|          |                   |  |            |     |     |   |            |     |           |       |       |          |   |  |  |
|----------|-------------------|--|------------|-----|-----|---|------------|-----|-----------|-------|-------|----------|---|--|--|
| 02.04.08 | 5.02.02.1.04.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | 21.996.000 | 100 | 100 | 0 | 21.996.000 | 100 | 3.000.000 | 13,64 | 86,36 | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah | <p>4. Balabkes : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>5. Bapelkes : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>6. BLPT : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>7. SMK N 6 Yogyakarta : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>8. SMK N 1 SEwon : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>9. SMK N 3 Wonosari : 0 Lembaga dari 1 Lembaga</p> | <p>Pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2024 dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPK BLUD Triwulan 1 Tahun 2004.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/> Deviasi keuangan sebesar Rp. 18.846.000,- terdiri dari : 1. Belanja honorarium narasumber Rp. 9.600.000,- dan Belanja Perjalanan dinas sebesar Rp. 9.396.000,- disebabkan oleh faktor eksternal. Anggaran tersebut diperuntukkan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi E BLUD oleh Pemda DIY dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri, namun ternyata terdapat perubahan kebijakan oleh Kemendagri bahwa pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia sebagai rekanan Kemendagri dalam</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br/> 2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br/> 3. SDM yang kompeten</p> |
|----------|-------------------|--|------------|-----|-----|---|------------|-----|-----------|-------|-------|----------|---|--|--|

|          |                   |   |               |       |       |   |                 |       |                 |       |       |          |   |  |   |  |  |  |
|----------|-------------------|---|---------------|-------|-------|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------|---|--|---|--|--|--|
| 02.05    | 5.02.02.1.05      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | #####         | 59,07 | 59,07 | 0 | 823.325.561.589 | 57,2  | 609.952.953.411 | 42,38 | 14,82 |          |   |  |   |  |  |  |
| 02.05.01 | 5.02.02.1.05.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                    | 2.835.355.556 | 25,96 | 25,96 | 0 | 623.540.000     | 21,99 | 612.804.020     | 21,61 | 0,38  | BPKA DIY | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah | <p>1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah : 0<br/>Laporan dari 6 Laporan</p> <p>2. Deviden BUKP : 0<br/>Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Deviden BUMD : 0<br/>Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Audit KAP terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2023 : 1<br/>Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun Buku N-1 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Keputusan Kepala BPKA tentang RKAT 2025 selambat-lambatnya November 2024 : 0<br/>Laporan dari 1 Laporan</p> <p>7. Laporan Hasil analisis Investasi Pemerintah Daerah, Nilai NPL BUKP : 0<br/>Laporan dari 1 Laporan</p> | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terselesaikannya Audit KAP terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2023</p> <p>Terselesaikannya Laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun Buku N-1 Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 196/KEP/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2023.</p> <p>Dalam proses Penetapan Pembagian Laba Bersih BUKP</p> <p>Terlaksananya Seleksi Calon Anggota Direksi BUMD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.735.980,- terdiri dari : 1. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 1.230.000,- dan Belanja jasa konsultasi bidang keuangan berupa belanja honorarium sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisa pengadaan sebesar Rp. 3.505.980,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> |  |  |  |



|          |                   |  |                 |      |      |   |                 |       |                 |       |       |          |   |   |
|----------|-------------------|--|-----------------|------|------|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------|---|---|
| 02.05.02 | 5.02.02.1.05.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 572.068.456.650 | 83,3 | 83,3 | 0 | 461.726.769.620 | 80,71 | 380.313.546.888 | 66,48 | 14,23 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | <p>6. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan Mardikorejo Tempel untuk keg. arsitektur gaya Yogyakarta (RTLH)</p> <p>7. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta yang bersifat khusus untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada</p> <p>8. Terselurkannya Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, yang bersifat khusus untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>Kendala yang dihadapi berasal dari faktor eksternal :</p> <p>1. Realisasi fisik berkas pengajuan BKK sesuai target akan tetapi realisasi keuangan menyesuaikan ketersediaan dana dari pusat</p> <p>2. Pencairan terkendala dengan belum disertakannya APBKal sebagai salah satu syarat pencairan. Hal ini disebabkan APBKal belum ditetapkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> |
|----------|-------------------|--|-----------------|------|------|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------|---|---|



|          |                   |   |                 |       |       |   |                 |       |                 |       |       |          |   |  |  |
|----------|-------------------|---|-----------------|-------|-------|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------|---|--|--|
| 02.05.04 | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi    | 848.882.026.968 | 43    | 43    | 0 | 353.171.254.099 | 41,6  | 229.026.602.503 | 26,98 | 14,62 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat | 3. Tersalurkannya dana bagi hasil pajak daerah bulan Februari dan maret TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Kulon progo, Gunungkidul dan Sleman<br>4. Tersalurkannya dana bagi hasil pajak daerah bulan Februari dan maret TA 2024 pada Pemerintah Kota Yogyakarta<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adanya pencabutan kebijakan terkait PerGub nomer 89/ Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil, sehingga pencairan dana bagi hasil mengalami kemunduran dari yang di rencanakan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024<br>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY<br>3. SDM yang kompeten |  |
| 3        | 05.02.03          | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.244.301.500   | 72,64 | 72,64 | 0 | 719.743.500     | 32,07 | 645.443.151     | 28,76 | 3,31  |          |   |  |  |
| 03.01    | 5.02.03.1.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah         | 2.244.301.500   | 72,64 | 72,64 | 0 | 719.743.500     | 32,07 | 645.443.151     | 28,76 | 3,31  |          |   |  |  |
|          |                   |   |                 |       |       |   |                 |       |                 |       |       |          |   | 1. Jumlah Standar Harga yang Disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen<br>2. Dokumen SHBJ : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Desk Pencermatan Usulan SHBJ Redesain I Dais |

|          |                   |  |             |     |     |   |            |      |            |       |      |          |  |  |
|----------|-------------------|--|-------------|-----|-----|---|------------|------|------------|-------|------|----------|--|--|
| 03.01.01 | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                         | 301.710.000 | 90  | 90  | 0 | 11.710.000 | 3,88 | 2.565.000  | 0,85  | 3,03 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah                           | <p>- SK Gub tentang SHS Barang dan SHS Jasa TA 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1- Usulan SHS belum dilengkapi data dukung sesuai SE.</p> <p>- Terdapat OPD yang terlambat dalam pengajuan SHS. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 9.145.000,- terdiri dari : Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 3.345.000,- dan Belanja honorarium Narasumber Rp. 5.800.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Surat usulan dilengkapi SPTJM dan survey harga/RAB. Data survey sudah tersedia. Mempermudah proses dalam proyeksi dan penetapan shbj tahun mendatang</p> |
| 03.01.02 | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 54.049.600  | 100 | 100 | 0 | 54.049.600 | 100  | 53.288.450 | 98,59 | 1,41 | BPKA DIY | Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah | <p>1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen RKBMD : 1 Doukumen dari 1 Doukumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Menerbitkan SK RKBMD 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat temuan BPK untuk menambahkan lokasi penempatan dan rencana penggunaan barang sehingga diperlukan pengembangan aplikasi yang berbeda dari tahun sebelumnya</p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 761.150,- adalah efisiensi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>                                      |



|          |                   |                                |               |      |      |   |             |       |             |       |     |          |   |   |  |
|----------|-------------------|--------------------------------|---------------|------|------|---|-------------|-------|-------------|-------|-----|----------|---|---|--|
| 03.01.04 | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 1.120.650.200 | 81,5 | 81,5 | 0 | 342.191.900 | 30,54 | 282.907.171 | 25,24 | 5,3 | BPKA DIY | Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | <p>Pengumuman Calon Peserta KSP lolos Kualifikasi Administrasi dan Teknis untuk ke proses selanjutnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> ada pihak BUMD yang aset nya menjadi satu dengan BMD Pemda DIY sehingga proses koordinasi dan penyesuaian proses perlu lebih mendapat perhatian</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 64.284.729,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja makan minum rapat Rp. 2.355.000,-</p> <p>2. Belanja jasa keamanan Rp. 13.760.000,-</p> <p>3. Belanja tagihan listrik sebesar Rp. 34.644.163,-</p> <p>4. Belanja registrasi/keanggotaan Rp. 13.424.320,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> inventaris dan dokumen BMD yang akan di kerjasamakan lengkap sehingga tinggal melengkapi teknis untuk KAK dan dokumen pemilihan. Dokumen Pemilihan cukup detail dan rigid dalam persyaratan sehingga proses pemilihan calon mitra KSP sesuai dengan rencana</p> |  |
|          |                   |                                |               |      |      |   |             |       |             |       |     |          |   | <p>1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah : 0</p> <p>Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan Kajian Pemanfaatan BMD : 0</p> <p>Laporan dari 1 Laporan</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>penilaian BMD tahap 1 untuk BMD idle telah dilaksanakan dan usulan dari OPD</p> |

|          |                   |                               |             |    |    |   |            |       |            |       |      |          |   |  |
|----------|-------------------|-------------------------------|-------------|----|----|---|------------|-------|------------|-------|------|----------|---|--|
| 03.01.05 | 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 210.799.700 | 70 | 70 | 0 | 70.000.000 | 33,21 | 69.197.400 | 32,83 | 0,38 | BPKA DIY | Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | <p>3. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Rapat Koordinasi intern pemda DIY dan cek lokasi</p> <p>penilaian tahap 1 telah dilaksanakan untuk 8 lokasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b><br/>BMD yang akan dinilai cukup banyak sehingga dibagi 2 tahap di semester 1 dan 2 tergantung dari prioritas.<br/>Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 802.600,- adalah sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>untuk BMD idle data cukup tersedia sehingga objek yang akan dinilai memiliki historis yang mempermudah penilaian.</p> |
|          |                   |                               |             |    |    |   |            |       |            |       |      |          |   | <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah : Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Pemindahtanganan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen Pemusnahan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>*- Penjualan BMD berupa:</p> <p>1. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>   |

|          |                   |   |             |       |       |   |             |       |             |      |      |          |  |  |
|----------|-------------------|---|-------------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------|------|------|----------|--|--|
| 03.01.06 | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 266.643.000 | 69,45 | 69,45 | 0 | 183.843.000 | 68,95 | 180.515.200 | 67,7 | 1,25 | BPKA DIY | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah | <p>4. Dokumen Penghapusan BMD : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional.</p> <p>3. Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan.</p> <p>4. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit.</p> <p>6. Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPPTG) Unit Fasilitas Kemasan yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab Sleman D.I. Yogyakarta.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat banyak peserta lelang yang mendaftar (setor jaminan penawaran), tapi tidak semuanya memasukkan surat penawaran.</p> |
|----------|-------------------|---|-------------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------|------|------|----------|--|--|



|          |                   |                                      |               |       |       |   |             |       |             |       |      |          |   |   |  |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------|-------|------|----------|---|---|--|
| 04.01.01 | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 3.241.398.400 | 71,14 | 71,14 | 0 | 731.169.400 | 22,56 | 702.554.840 | 21,67 | 0,89 | BPKA DIY | Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Pajak Daerah | <p>2. Belanja bahan komputer Rp. 4.022.760,-</p> <p>3. Belanja alat listrik Rp. 560.000,- efisiensi</p> <p>4. Belanja makan minum aktivitas lapangan Rp. 6.860.000,-</p> <p>5. Belanja honor tim pelaksana kegiatan Rp. 3.000.000,-</p> <p>6. Belanja jasa pelayanan umum Rp. 8.040.000,-</p> <p>7. Belanja perjalanan dinas tetap Rp. 15.280.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b><br/>Pengadaan plastik TBPKP menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif karena melalui e-katalog</p> <p>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 29 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Peraturan Gubernur DIY Tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>3. SDM yang kompeten</p> |  |
|          |                   |                                      |               |       |       |   |             |       |             |       |      |          |   | <p>1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan Dana Keistimewaan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DID : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>  | <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penggandaan dan Jilid Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap I sebagai salah satu syarat salur Dana Keistimewaan DIY Tahap II</p> <p>2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2024</p> |

|          |                   |  |            |       |       |   |            |       |            |       |       |          |   |   |   |
|----------|-------------------|--|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|-------|----------|---|---|---|
| 04.01.02 | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 17.849.100 | 88,31 | 88,31 | 0 | 15.762.550 | 88,31 | 11.502.000 | 64,44 | 23,87 | BPKA DIY | Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Retribusi Daerah | <p>4. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DAK Fisik : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DAK Non Fisik : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: Laporan DBH : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> | <p>3. Rapat Koordinasi Pengembalian Dana BOSP</p> <p>4. Rapat Koordinasi Penggunaan Sisa DBH CHT TA 2023 dan Tambahan DBH CHT</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1.a. Penggandaan dan Jilid Laporan Tahunan Dana Keistimewaan tidak terealisasi karena berdasarkan rapat koordinasi disepakati bahwa Paniradya Kaistimewaan yang bertugas untuk membuat Laporan Tahunan.</p> <p>1.b. Penggandaan dan Jilid Laporan Realisasi Penyerapan DAIS untuk syarat salur Tahap I tidak terealisasi karena terdapat PMK baru, yaitu PMK Nomor 163 Tahun 2023 yang mengatur bahwa dokumen syarat salur DAIS Tahap I adalah Laporan Tahunan, tidak perlu Laporan Realisasi Penyerapan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>2. Koordinasi dengan OPD Pengelola DAK Fisik dan Kanwil DJPb DIY berjalan dengan lancar</p> |
|----------|-------------------|--|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------|-------|-------|----------|---|---|---|



|               |                   |   |         |       |       |   |                 |       |                 |       |   |  |  |          |   |   |
|---------------|-------------------|---|---------|-------|-------|---|-----------------|-------|-----------------|-------|---|--|--|----------|---|---|
| 04.01.05      | 5.02.04.1.01.0014 | EKSEKUSI TRANSAKSI<br>Pemerintah Daerah | 999.950 | 50,02 | 50,02 | 0 | 500.150         | 50,02 | 500.150         | 50,02 | 0 |  |  | BPKA DIY | Pengapatan -<br>Subbidang<br>Retribusi Daerah | Terlaksana Sesuai target  |
| <b>Jumlah</b> |                   |   | #####   | 58,15 | 58,15 |   | 857.530.835.512 | 55,96 | 638.134.750.331 | 41,64 |   |  |  |          |   | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Pengisian Rincian<br>Realisasi Transaksi<br>Keuangan Daerah untuk<br>setiap kanal<br>pembayaran pada<br>semester I telah selesai<br>sehingga tercapainya<br>Laporan Indeks ETPD<br>Semester I |